

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan pembangunan membutuhkan sinergitas rencana antara rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas serta tingkat kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### 4.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran pokok yang dikemas dalam isu strategi pembangunan nasional secara umum menggariskan hal-hal sebagai berikut :

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
  - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
  - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan:
  - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu sektor kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
  - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.  
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah,
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain: kepastian dan penegakan hukum; keamanan dan ketertiban; politik dan demokrasi; dan tata kelola dan reformasi birokrasi.

Sementara itu prioritas nasional untuk 2015-2019 dituangkan dalam 9 (Sembilan) agenda prioritas atau *Nawacita* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
  - a. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif;
  - b. Memperkuat Sistem Pertahanan Nasional;
  - c. Memperkuat Jati diri Sebagai Negara Maritim;
  - d. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara
  - e. Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
  - f. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;
  - g. Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional;
  - h. Meminimalisasi Dampak Globalisasi;
  - i. Membangun Industri Pertahanan Nasional;
  - j. Membangun Polri yang Professional;
  - k. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi dan Kependudukan.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

- a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
  - b. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
  - c. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
  - d. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
  - e. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- a. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris;
  - b. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia;
  - c. Penanggulangan Kemiskinan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- a. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;
  - b. Mencegah dan Memberantas Korupsi;
  - c. Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; Memberantas Narkoba dan Psikotropika;
  - d. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan
  - e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
  - b. Pembangunan pendidikan khususnya;
  - c. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
  - d. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan
  - e. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  - a. Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan;
  - b. Membangun Transportasi Massal Perkotaan;
  - c. Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar;
  - d. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur;
  - e. Memperkuat Peran Investasi;
  - f. Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan;
  - g. Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi;
  - h. Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
  - i. Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional;
  - j. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja;
  - k. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  - a. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
  - b. Peningkatan Ketahanan Air;
  - c. Peningkatan Kedaulatan Energi;
  - d. Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
  - e. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
  - f. Penguatan Sektor Keuangan;
  - g. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
  - a. Sejarah yang mengajarkan kisah-kisah kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme, dan pengabdian;
  - b. Geografi diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran teritorial, orientasi lokasi, kesadaran kewarganegaraan;

- c. Antropologi/Sosiologi bermanfaat untuk memperkuat pemahaman multikulturalisme, pluralisme, interaksi sosial, dan pengakuan atas keragaman etnis, budaya, agama; dan
  - d. Bahasa Indonesia sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
9. Memperteguh ke-*bhinneka*-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1. Sasaran Makro;
- 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
- 4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
- 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar wilayah; dan
- 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan RPJMD, ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- d. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan;
- e. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
- f. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan penciptaan kondusivitas wilayah.

#### 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2018

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan, serta sebagai pedoman untuk menentukan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Arah kebijakan pada periode tahun kedua memiliki makna strategis melanjutkan capaian tahap pertama dan menjadi pijakan dari tahap ketiga, tema pembangunan tahap ini adalah:

<p style="text-align: center;"><b>“Pengembangan Infrastruktur Berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)”</b></p>
---

Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan investasi diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Hijau (termasuk Kabupaten air) dan *Smart City* sebagai monumen akhir RPJMD 2016-2021. Pondasi cita-cita tersebut dimulai dari penyediaan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, maupun infrastruktur

sosial. Selain fokus tersebut, tahun kedua masih melanjutkan agenda tahun pertama yaitu menjaring investor dan investasi, serta pelayanan publik yang bersifat rutin berkelanjutan.

Prioritas Tahun 2018 secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, dan pemasaran hasil produksinya, serta pengembangan daya tarik destinasi dan jenis event pariwisata untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan hidup;
2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan untuk mendukung prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, dan program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur E-governance, peningkatan keterampilan aparat dan penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pelayanan berbasis teknologi; untuk mendukung prioritas *Smart City*;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau, dan peningkatan pelayanan wajib dasar kesehatan dan pendidikan;
5. Implementasi regulasi daerah ramah investasi dan implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat; dan
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Pada Tahun 2018 arah kebijakan yang dikembangkan yaitu:

1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi;
2. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;
3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kesejahteraan sosial;
6. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan;
7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
8. Peningkatan daya saing perdagangan;
9. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian; dan
10. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif.

Tabel IV.1  
 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah 2018 dengan  
 Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Boyolali
1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.	Peningkatan produksi pertanian, peternakan/perikanan dan pemasaran hasil.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan. masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.	Peningkatan produksi pertanian, peternakan/perikanan dan pemasaran hasil untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan, dan penurunan kemiskinan.



Prioritas Pembangunan Provinsi Tema Tersebut	Prioritas Pembangunan Kabupaten Dumali:
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.	Penyediaan regulasi daerah ramah investasi dan Peningkatan skema KPS (kerjasama Pemerintah-Swasta).
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran.	Penyediaan regulasi daerah ramah investasi dan peningkatan skema KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta).
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang.
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.	Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan.
	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur <i>e-governance</i> .
	Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Sasaran serta indikator sasaran pada masing-masing prioritas tersebut adalah sebagai berikut: